

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019

Pantun Bukit

Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

Correspondence email: pantun.bukit@unbari.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis; pertama pengaruh langsung dan tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Daerah. Tujuan kedua pengaruh langsung dan tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan ketiga pengaruh kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan keempat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. Penelitian ini menggunakan sensus, semua kabupaten/kota digunakan jadi sampel, periode penelitian adalah tahun 2010-2019. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Data diambil dari realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan pertumbuhan ekonomi dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2019. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2019. Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2019. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Kemandirian Daerah; Pertumbuhan Ekonomi.

Abstract. The title of this research is *The Effect Of Local Government Revenue And General Allocation Funds On Regional Independence And Their Impact On Economic Growth In District/City In Jambi Province 2010-2019*. This study aims to identify and analyze; First, the direct and indirect influence of Local Government Revenue (PAD) and General Allocation Funds (DAU) on Regional Independence. The second objective is the direct and indirect influence of Local Government Revenue (PAD) and General Allocation Funds (DAU) on economic growth. The third objective is the influence of regional independence on economic growth. The fourth objective is the influence of Local Government Revenue and General Allocation Funds on Economic Growth through Regional Self-reliance in Regencies/Cities in Jambi Province 2010-2019. This study uses a census, all districts/cities are used as samples, the research period is 2010-2019. The analytical tool used is path analysis. The data sources are from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Financial Balance. The data is taken from the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and economic growth from the Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant prices. The results of the study show that Regional Original Income (PAD) has a positive and significant effect on regional independence, the General Allocation Fund (DAU) has a negative and significant effect on Regional Independence. Local Government Revenue (PAD) has no significant effect on Economic Growth. The General Allocation Fund (DAU) has a significant and negative effect on the economic growth of districts/cities in Jambi Province in 2010-2019. Regional Independence has no significant effect on Regency/City Economic Growth in Jambi Province in 2010-2019. Local Government Revenue (PAD) and General Allocation Funds (DAU) through regional independence have no effect on Economic Growth in regencies/cities in Jambi Province in 2010-2019

Keywords: Local Government Revenue; General Allocation Fund; Regional Independent; Economic Growth.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang semakin meningkat, diharapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya di minimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan Peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar

daerah sangat timbang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi, dimana hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relatif mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasian-nya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain DAU, pemerintah juga memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Persoalan kemandirian keuangan pemerintah daerah ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi daerah disebabkan oleh masalah makin membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan publik, sementara laju pertumbuhan penerimaan daerah tidak mencukupi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. Peningkatan kapasitas fiskal daerah ini pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut berupa: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, PAD adalah Penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019 (dalam Milyaran)

Kab./Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	GR (%)
Prov. Jambi	686,62	984,23	995,20	1.069,0	1.281,0	1.241,0	1.233,0	1.580,0	1.656,0	1.651,0	10,24
Kota Jambi	70,84	98,99	113,09	149,04	246,42	263,92	287,52	397,32	338,89	393,42	20,98
Ma. Jambi	16,83	28,22	36,38	48,33	61,63	63,66	60,63	77,92	90,30	93,79	21,03
Batanghari	22,21	35,72	37,22	50,62	70,80	68,92	73,51	87,92	98,80	91,56	17,04
Merangin	25,31	39,64	30,11	44,39	67,20	76,94	56,87	86,70	89,30	106,16	17,27
Sarolangun	18,92	31,60	28,00	31,30	60,95	85,37	92,42	85,18	118,82	94,62	19,58
Sei. Penuh	8,28	14,35	19,70	24,26	33,19	36,24	36,63	31,42	34,18	34,90	17,33
Kennici	30,52	34,93	32,01	36,44	55,55	70,46	80,85	85,76	80,48	85,90	12,18
Bungo	45,86	60,70	64,28	80,20	107,01	105,27	114,81	183,13	133,84	140,32	13,23
Tebo	15,95	19,53	26,93	34,33	56,84	62,03	60,93	68,40	76,16	83,23	20,15
Tjb. Barat	21,81	40,60	44,63	54,64	75,79	68,04	85,93	98,77	101,84	120,22	20,88
Tjb. Timur	19,95	24,62	29,43	29,81	34,68	38,47	43,93	76,77	49,60	33,91	11,68
Total PAD Kab/Kota	984,11	1413,1	1456,9	584,62	871,3	940,5	995,2	1.280,8	1.213,8	1.299,6	3,14

GR (%) = Pertumbuhan rata-rata (%)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Periode 2021

Berdasarkan data yang di peroleh, Penerimaan PAD terendah terjadi di Kota Sungai Penuh tahun 2010 dengan PAD sebesar Rp 8,28 milyar, Tebo sebesar Rp 15,95 milyar dan Muaro Jambi sebesar Rp 16,83 milyar. Selanjutnya pertumbuhan PAD yang paling tinggi kurun waktu 2010-2019 adalah Kabupaten Muaro Jambi sebesar 21,03 persen, Kota Jambi 20,98 persen, Tanjung Jabung Barat 20,88 persen dan tebo sebesar 20,15 persen. Penerimaan PAD tahun 2019 yang paling besar Kota Jambi sebesar Rp 393,42 milyar. Penerimaan PAD Kabupaten/Kota mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yang paling rendah yaitu Tanjung Jabung Timur 11,68 persen. UU Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU adalah salah satu komponen di dalam APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas formula daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN.

Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya di-alokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut (Susilo dkk (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. DAU bertujuan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah *horizontal imbalance* yang dialokasikan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (block grants). Konsep dasar formulasi DAU sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 1999 itu secara implisit merupakan penjabaran dari teori *governmental transfer* yang berbasis pada konsep fiskal gap.

Tabel 2. Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019 (dalam Milyaran rupiah)

Kab./Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	GR (%)
Prov. Jambi	488,7	583,88	731,95	836,57	948,33	1.009	1.466	1.397	1.399	1.433	12,7
Kota Jambi	379,1	441,5	543,5	626,3	678,6	668,2	727,5	714,7	714,7	757,4	7,99
Muaro Jambi	307,1	370,9	438,2	543,4	365,2	372,6	681,5	670,3	670,3	699,0	15,1
Batanghari	283,6	344,7	427,8	507,4	527,2	517,9	610,9	605,7	605,7	627,3	9,22
Merangin	352,5	416,1	509,6	565,1	633,6	642,0	792,3	718,8	718,8	742,3	8,63
Sarolangun	303,5	352,0	419,8	472,5	513,1	517,6	587,4	583,1	538,1	599,5	7,86
Sungai Penuh	239,0	257,5	295,5	344,5	365,2	370,1	425,6	419,5	422,5	447,8	38,4
Kennici	327,3	369,0	442,6	501,1	545,3	550,8	594,7	589,2	589,2	612,2	7,21
Bungo	311,7	379,2	456,3	523,6	579,6	580,9	641,6	635,9	635,9	656,1	8,62
Tebo	285,5	350,9	410,8	461,0	509,3	507,1	586,9	582,3	582,3	598,2	8,57
Tanjung Barat	210,2	279,3	329,4	387,9	429,9	386,1	507,9	506,5	506,4	536,1	10,9
Tanjung Timur	239,7	281,5	356,3	430,3	455,9	432,0	533,8	533,2	540,4	564,4	9,98
Total DAU Kab/Kota	3239,2	3843,5	4649,8	5363,1	5802,9	5745,3	6690,1	6559,2	6524,3	6840,3	145,43

GR (%) = Pertumbuhan rata-rata (%)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Periode 2021

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat Penerimaan DAU per Kabupaten/Kota tahun 2010

terendah Tanjab Barat sebesar Rp 210,22 milyar, tertinggi Kota Jambi sebesar Rp 379,1 milyar. Selanjutnya tahun 2019 yang terendah Kota Sungai Penuh Rp 447,8 milyar yang tertinggi Kota Jambi sebesar Rp 757,4 milyar. Jika dilihat dari pertumbuhan DAU kurun waktu 2010-2019 semuanya mengalami pertumbuhan yang signifikan yang tertinggi Kota Sungai Penuh sebesar 38,4 persen, kemudian Muaro Jambi 15,1 persen dan yang terendah Kabupaten Kerinci 7,21 persen.

Tabel 3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. (Dalam Milyaran)

Kab./Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	GR (%)
Provinsi Jambi	1.640	2.078	2.662	2.878	3.165	3.129	3.394	4.311	4.412	4.575	10,50
Kota Jambi	692,1	869,9	1.083	1.164	1.320	1.387	1.571	1.500	1.624	1.699	9,79
Muaro Jambi	604,1	715,0	844,5	957,2	992,2	1.071	1.186	1.213	1.319	1.400	10,28
Batanghari	547,4	649,9	803,7	948,6	949,7	915,3	1.075	1.172	1.199	1.320	11,63
Merangin	560,4	707,0	794,2	925,3	1.039	1.158	1.299	1.337	1.334	1.508	10,78
Sarolangun	327,1	665,7	751,5	822,9	893,5	989,7	1.090	1.181	1.226	1.324	9,43
Sungai Penuh	366,2	452,2	472,3	557,4	598,2	626,2	707,1	686,1	727,1	823,1	10,20
Kerinci	541,8	633,3	712,5	801,6	869,3	973,5	1.057	1.201	1.202	1.298	9,02
Bungo	620,6	709,8	775,9	941,4	1.036	1.058	1.160	1.281	1.261	1.349	9,61
Tebo	506,7	588,1	684,3	793,0	883,3	882,9	990,8	1.014	1.099	1.157	9,25
Tanjab Barat	740,6	895,4	990,8	1.101	1.100	931,3	1.240	1.287	1.383	1.642	6,65
Tanjab Timur	669,6	671,2	809,7	920,6	932,2	920,1	1.091	1.081	1.093	1.195	9,74
Total APBD Kab/Kota	6.377,3	7.558,2	8.724,1	9.934,9	10.615,3	10.915,1	12.473,6	12.957,3	13.472,3	14.720,9	10,50

GR (%) = Pertumbuhan rata-rata (%)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Periode 2021

Tabel 3 menunjukkan perkembangan APBD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, APBD yang terendah tahun 2010 adalah Kota Sungai Penuh sebesar Rp 366,2 milyar, yang tertinggi adalah Tanjung Jabung Barat sebesar Rp 740,6 milyar. Selanjutnya tahun 2019 yang terendah adalah masih Kota Sungai Penuh sebesar Rp 447,8 milyar dan yang tertinggi Kota Jambi sebesar Rp 757,4 milyar. Namun jika dilihat dari pertumbuhan kurun waktu 2010-2019 yang tertinggi adalah Kabupaten Batang Hari sebesar 11,63 persen/tahun dan yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 6,65 persen pertahun.

Kemandirian Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Berikut definisi ukuran daerah dapat dikatakan mandiri Menurut Ardhini (2011) yaitu : (a) apabila tingkat kemandirian 0% - 25% berarti kemampuan kemandirian daerah tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat tergantung kepada pemerintah pusat yang berarti tidak mampu melaksanakan otonomi daerah; (b) apabila tingkat kemandirian 25% - 50% berarti kemampuan kemandirian daerah tersebut rendah, Namun campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dengan demikian dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah; dan (c) apabila tingkat kemandirian 50% - 75% berarti kemampuan kemandirian daerah tersebut sedang, dengan demikian daerah yang

bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi

Tabel 4. Kemandirian Daerah Kab./Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019 (%)

Kab./Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	GR(%)
Prov. Jambi	41,86	47,34	37,37	36,95	40,48	39,65	36,33	36,65	37,54	36,08	-1,64
Kota Jambi	10,23	11,37	10,44	12,80	18,66	19,02	18,30	26,48	20,86	23,15	9,50
Muaro Jambi	2,78	3,94	4,30	5,07	6,21	5,93	5,11	6,42	6,84	6,69	10,25
Batanghari	4,05	5,49	4,63	5,33	7,45	7,52	6,83	7,50	8,23	6,93	6,15
Merangin	4,51	5,60	3,79	4,79	6,46	6,64	4,39	6,48	6,69	7,03	5,06
Sarolangun	3,58	4,74	3,72	3,80	6,82	8,62	8,40	7,20	9,68	7,14	7,97
Sungai Penuh	2,26	3,17	4,17	4,35	5,54	5,78	5,18	4,57	4,70	4,23	7,21
Kerinci	5,63	5,51	4,49	4,54	6,39	7,23	7,64	7,13	6,69	6,61	1,80
Bungo	7,38	8,55	8,28	8,51	10,32	9,95	9,89	14,29	10,60	10,39	3,87
Tebo	3,14	3,32	3,93	4,32	6,43	7,02	6,15	6,74	6,92	7,19	9,64
Tanjab Barat	2,94	4,53	4,50	4,95	6,88	7,30	6,92	7,67	7,36	7,32	10,67
Tanjab Timur	2,97	3,66	3,63	3,23	3,72	4,18	4,02	7,10	4,53	4,50	4,73

GR (%) = Pertumbuhan rata-rata (%)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Periode 2021

Berdasarkan perhitungan Tabel 4, tingkat kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama tahun 2010-2019 masih tergolong sangat rendah sekali, karena berada pada interval 0%-25%, dan yang terendah tahun 2010 adalah Kota Sungai Penuh sebesar 2,26 persen, kemudian Muaro Jambi sebesar 2,78 persen dan yang tertinggi adalah Provinsi Jambi sebesar 41,86 persen dan Kota Jambi sebesar 10,23 persen. Selanjutnya tingkat kemandirian daerah tahun 2019 yang terendah masih Kota Sungai Penuh sebesar 4,23 persen, disusul Tanjung Jabung Timur sebesar 4,50 persen, sedangkan yang tertinggi tahun 2019 adalah Provinsi Jambi sebesar 36,08 persen disusul Kota Jambi sebesar 23,15 persen dan Kota Bungo sebesar 10,39 persen. Dari data tersebut menunjukkan tingkat kemandirian daerah untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi semua meningkat, namun masih dalam kategori tingkat kemandirian rendah sekali, karena kontribusi PAD masih dibawah 25 persen terhadap APBD-nya. Selanjutnya Kota Jambi pada tahun 2019 Kemandirian Daerahnya berkisar 23,15 persen, berarti kemampuan Kemandirian Daerah tersebut masih tergolong rendah sekali namun campur tangan Pemerintah Pusat mulai berkurang dan dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. Kabupaten/Kota yang paling tinggi pertumbuhan kemandirian daerahnya kurun waktu 2010-2019 adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 10,67 persen, disusul Muaro Jambi 10,25 persen dan Tebo 9,64 persen. Selanjutnya yang paling rendah adalah Kabupaten Kerinci 1,80 persen disusul Bungo 3,87 persen, sedangkan Provinsi Jambi kurun waktu 2010-2019 tingkat kemandirian daerahnya mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,64 persen pertahun, namun tingkat kemandirian daerahnya masuk kategori 25%-50% atau kategori rendah, dimana Kabupaten/Kota satupun tidak ada yang berada pada kategori tersebut, semuanya berada pada interval 0% - 25% atau tingkat kemandirian rendah sekali.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan dan kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Menurut Tambunan (2003),

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil atau suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah barang dan jasa meningkat. Pertumbuhan ekonomi harus mencerminkan pertumbuhan output per kapita berarti terjadi pertumbuhan upah riil dan meningkatkan standar hidup.

Berdasarkan Tabel 5 Pertumbuhan Ekonomi tahun 2010 yang paling tinggi adalah Kabupaten Sarolangun dan Batang Hari masing-masing sebesar 8,09 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 5,78 persen, dan Kerinci 5,89 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kota Jambi sebesar 5,33 persen, disusul Tanjung Jabung Barat 5,15 persen, sedangkan yang terendah tahun 2019 adalah Tanjung Jabung Timur sebesar 4,25 persen dan Kabupaten Bungo 4,34 persen. Selama kurun waktu 2010-2019 pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kabupaten Tanjab Timur pada tahun 2015 hanya tumbuh sebesar 1,87%, dan pertumbuhan paling tinggi terjadi di Kabupaten Bungo pada tahun 2012 sebesar 9,65%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan Provinsi Jambi kurun waktu 2010-2019 yang tertinggi adalah Kota Sungai Penuh sebesar 6,68 persen, disusul Kota Jambi 6,58 persen dan Kabupaten Bungo 6,49 persen, sedangkan yang terendah adalah Tanjung Jabung Timur 4,09 persen, disusul Tanjung Jabung Barat 5,47 persen dan Kabupaten Sarolangun dan Batang Hari masing-masing 6,00 persen.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019 (%)

Kab./Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata (%)
Prov. Jambi	7,35	8,54	7,03	7,07	7,76	4,21	4,37	4,64	4,71	4,40	6,01
Kota Jambi	6,66	6,97	7,67	8,50	8,17	5,56	6,81	4,68	5,48	5,33	6,58
Muaro Jambi	6,05	7,90	7,23	7,15	8,03	5,24	5,43	5,06	5,27	5,06	6,24
Batanghari	8,09	8,80	8,49	7,61	5,20	3,09	4,26	4,69	4,72	5,08	6,00
Merangin	7,85	7,02	6,37	6,45	7,13	5,48	6,21	5,55	5,17	4,51	6,17
Sarolangun	8,09	8,80	8,49	7,61	5,20	3,09	4,26	4,69	4,72	5,08	6,00
Sungai Penuh	6,47	6,73	7,09	8,45	7,54	7,06	6,52	6,24	5,54	5,12	6,68
Kerinci	5,89	5,69	7,5	6,16	9,06	6,45	6,70	6,03	5,10	5,02	6,36
Bungo	6,73	7,68	9,65	9,02	6,74	5,13	5,20	5,67	4,72	4,34	6,49
Tebo	5,96	6,78	7,7	7,63	8,83	5,28	5,38	5,60	5,02	4,78	6,30
Tanjab Barat	6,87	7,85	4,95	5,73	5,85	3,98	3,14	4,25	6,89	5,15	5,47
Tanjab Timur	5,78	6,83	2,78	4,57	5,81	1,87	2,70	3,13	3,13	4,25	4,09

GR (%) = Pertumbuhan rata-rata (%)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Periode 2021

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana di atur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: (1) Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah; (2) Retribusi Daerah. Sumber kedua untuk PAD berasal dari retribusi daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009); dan (3) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Terakhir ada lain-lain PAD yang sah. Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi ; Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Komisi/Potongannya ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaian barang/jasa oleh daerah.

Ketiganya bersinergi sehingga akan menghasilkan PAD yang mampu menunjang jalannya perekonomian di sebuah daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah juga memiliki pengaruhnya tersendiri baik bagi pengeluaran pemerintah maupun jumlah penduduk.

Dana Alokasi Umum/DAU

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Secara umum Dana Alokasi Umum terdiri dari : Dana Alokasi Umum(DAU) untuk daerah Provinsi dan Dana Alokasi Umum(DAU) untuk Daerah Kabupaten/Kota. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangannya 10% dan 90%. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

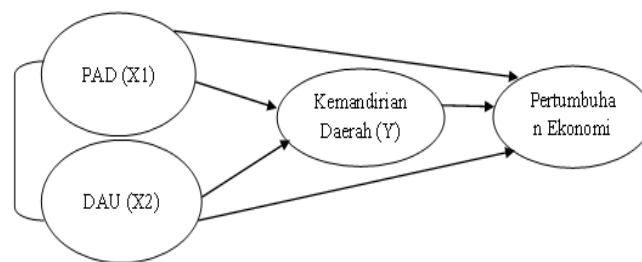
Kemandirian Daerah

Menurut Halim (2004) Kemandirian Daerah (otonomi fiskal) adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Secara Konseptual ada 4 pola hubungan yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah yaitu (Halim, 2004): (1) pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah; (2) pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sudah lebih mampu melaksanakan otonomi; (3) pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi; dan (4) pola hubungan delegatif, campur tangan pemaerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (1999), Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapitayang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan Ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dengan demikian makin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pertumbuhan Ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Dari uraian diatas dapat dijelaskan, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur terutama jalan, pelabuhan dan infrastruktur ekonomi lainnya, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, menyediakan perumahan dengan biaya rendah serta penguatan disektor pertanian yang meruapakan sektor basis terutama di Provinsi Jambi dan melakukan perbaikan lingkungan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dicapai.

METODE



Gambar 1. Model Penelitian

Keterangan:

X1 = PAD; X2 = DAU; Y = KD; Z =PE

Sampel penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data realisasi APBD kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, data pertumbuhan ekonomi tahun 2010-2019. Untuk kepentingan analisis, data PAD dan DAU yang digunakan berdasarkan realisasi anggaran tahun 2010-2019, data kemandirian daerah diukur dengan rasio kemandirian, menggunakan data realisasi anggaran tahun 2010-2019 sedangkan data pertumbuhan ekonomi, menggunakan data laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga tahun 2010-2019.

Alat Analisis Data

Untuk menjawab tujuan penelitian dan hipotesis penelitian digunakan alat analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur dapat dilihat dari uji *standardised coefficient beta* dan uji koefisien determinasi. Untuk menjawab tujuan penelitian dan hipotesis penelitian terdapat tiga model struktur penelitian, ditambah satu struktur gabungan atau lengkap (struktur 4) yaitu : Untuk menguji tujuan penelitian 1 dan menguji hipotesis 1 dan 2 menggunakan persamaan path analysis pada struktur 1, untuk menjawab tujuan 2 dan hipotesis 3 dan 4 digunakan path analysis pada struktur 2, untuk menjawab tujuan penelitian 3 dan hipotesis 5 digunakan persamaan path analysis pada struktur 1, untuk menjawab tujuan 2 dan hipotesis 3 dan 4 digunakan path analysis pada struktur 3, sedangkan untuk menjawab tujuan penelitian 4 digunakan struktur yang lengkap (struktur 4).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 6 memberikan gambaran umum kabupaten/kota yang terdiri atas variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi. ekonomi dengan jumlah sampel (N) sebanyak 120. Tabel 6 menunjukkan pendapatan asli daerah mempunyai nilai rata-rata Rp 10,8738 Milyar, DAU sebesar Rp 11,7087 milyar, kemnadirian daerah rata-rata sebesar 0,8597 dan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 0,7636 selama kurun waktu 2010-2019.

Tabel 6. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah (X1)	120	9,92	12,22	10,8738	,47076
Dana Alokasi Umum (X2)	120	11,32	12,17	11,7087	,15506
Kemandirian Daerah (Y)	120	,35	1,68	,8597	,29265
Pertumbuhan Ekonomi (Z)	120	,27	,99	,7636	,12632
Valid N (listwise)	120				

Sumber: Data diolah

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang digunakan adalah berdistribusi normal. Menurut Ghozali (2009) data dikatakan berdistribusi normal apabila $rxftaxAsjmp Sig. (2-tailed)$ lebih besar dari $\alpha (0.05)$. Pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dilihat dari nilai $Asymp. Sig. (2-tailed) > \alpha (0.05)$.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,739	1,165			4,068	,000		
X1	,068	,043			,255	1,590	,301	3,327
X2	-,403	,130			-,495	-,3090	,003	3,327

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai Tolerance dari Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,301, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,301 menunjukkan nilai Tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF dari Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3,327, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3,327 menunjukkan nilai di bawah 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2009). Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji *White*. Pengujiannya adalah jika c hitung $< c$ tabel maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dimana c hitung = $n \times R^2$, sedangkan c tabel didapatkan dengan melihat tabel *chisquare* (Ghozali, 2009)

Tabel 8. Uji Heterokedastisitas Model 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,981 ^a	,963	,963	,056511

Sumber: Data diolah

Tabel 9. Uji Heterokedastisitas Model 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
2	,314 ^a	,099	,083	,120937

Sumber: Data diolah

Hasil uji heterokedastisitas yang disajikan pada Tabel 8 dan 9 dapat disimpulkan bahwa model 1 dan model 2 mempunyai nilai c hitung $< c$ tabel, pada model 1 yaitu c hitung = 115,56 $<$ chi square tabel = 124,342 dan model 2 yaitu c hitung = 11,88 $<$ chi

square = 124,342, maka dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing model tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 10. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,981 ^a	,963	,963	,05651	,570

Sumber: Data diolah

Tabel 10 dapat dilihat nilai DW adalah sebesar 1,027, ini berarti dapat disimpulkan bahwa: Nilai DW: 0,570, Nilai $du = 1,7361$ dan Nilai $4-du = 4-1,7361 = 2,2639$. Jadi Nilai $dw 0,570 < 1,7361 < 2,2639$, maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 11. Hasil Analisis of Varians Model 1

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	9,818	2	4,909	1537,135	,000 ^b
Residual	,374	117	,003		
Total	10,191	119			

Sumber: Data diolah

Tabel 11 ditunjukkan bahwa F hitung adalah 1537,135 dan F tabel adalah 3,087 dengan nilai sig. 0,000, artinya F hitung $>$ F tabel atau signifikansi 0,000 $<$ 0,05, atau H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi berhasil mendorong PAD dan DAU secara simultan untuk mendorong peningkatan kemandirian daerah. Tabel 12 ditunjukkan bahwa nilai t hitung variabel PAD (X_1) 36,666 $>$ t tabel 1,984, atau dengan sig. 0,000 $<$ (0,05), sehingga dapat disimpulkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah dengan *Standardized Coefficients beta* untuk variabel PAD adalah 1,184. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berhasil mengoptimalkan PAD yang dimiliki untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi terus berupaya untuk mencari langkah-langkah terobosan baru agar PAD yang diperoleh akan semakin besar. PAD yang besar akan menyebabkan Kemandirian Daerah juga semakin besar. Selanjutnya nilai t hitung variabel DAU sebesar $|-7,861| >$ t tabel 1,984 atau dengan nilai sig. 0,000 $<$ 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah, dengan nilai *Standardised Coefficients beta* variabel DAU adalah -0,254. Hal ini menyatakan semakin besar transfer dana yang diberikan kepada daerah maka tingkat Kemandirian Daerah akan semakin menurun.

Tabel 12. Hasil Pengujian Hipotesis Model 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,534	,544		-2,817	,006
X1 (PAD)	,736	,020	1,184	36,666	,000
X2 (DAU)	-,479	,061	-,254	-7,861	,000

Sumber: Data diolah

Tabel 13. Hasil Analisis of Varians Model 1

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
2 Regression	,188	2	,094	6,418	,002 ^b
Residual	1,711	117	,015		
Total	1,899	119			

Sumber: Data diolah

Tabel 13 ditunjukkan bahwa F hitung adalah 6,418 dan F tabel adalah 3,087 dengan nilai sig. 0,002, artinya F hitung > F tabel atau signifikansi 0,002 < 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima artinya dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi berhasil mendorong PAD dan DAU secara simultan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 14. Hasil Pengujian Hipotesis Model 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,739	1,165		4,068	,000
X1	,068	,043	,255	1,590	,115
X2	-,403	,130	-,495	-3,090	,003

Sumber: Data diolah

Tabel 14 ditunjukkan bahwa nilai t hitung variabel PAD (X₁) 1,590 < t tabel 1,984, atau dengan sig. 0,115 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi Daerah dengan *Standardized Coefficients beta* untuk variabel PAD adalah 0,255. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi belum berhasil mengoptimalkan PAD yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan daerahnya. Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi terus berupaya untuk mencari langkah-langkah terobosan baru agar PAD yang diperoleh akan semakin besar, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya nilai t hitung variabel DAU (X₂) sebesar |-3,090| > t tabel 1,984 atau dengan nilai sig. 0,003 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan nilai *Standardised Coefficients beta* variabel DAU adalah -0,495. Hal ini menyatakan semakin besar transfer dana yang diberikan kepada daerah maka tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin menurun.

Tabel 15. Hasil Pengujian Hipotesis Model 3

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,005	1	,005	,328	,568 ^b
Residual	1,894	118	,016		
Total	1,899	119			

Sumber: Data diolah

Tabel 15 ditunjukkan bahwa F hitung adalah 0,328 dan F tabel adalah 3,087 dengan nilai sig. 0,568, artinya F hitung < F tabel atau signifikansi 0,568 > 0,05, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak artinya dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Daerah (Y) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah kurun waktu 2010-2019.

Pengaruh langsung dan tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.

Pengaruh PAD (X₁) secara langsung terhadap Kemandirian Daerah (Y) positif sebesar 140,19%, sedangkan pengaruh tidak langsungnya sebesar -25,14%, sehingga secara total pengaruh langsung dan tidak langsung PAD terhadap kemandirian daerah sebesar 115,04%. Penelitian ini sejalan dengan Afrizal Tahar dan Maulida Zakhya (2011) bawa PAD berpengaruh langsung dan positif terhadap kemandirian daerah di kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. Selanjutnya pengaruh langsung DAU terhadap Kemandirian Daerah signifikan, namun hanya sebesar 6,45%, Pengaruh tidak langsung DAU terhadap kemandirian daerah sebesar -25,14%, sehingga pengaruh total DAU langsung dan tidak langsung terhadap kemandirian daerah sebesar -18,69%. Dengan demikian pengaruh langsung dan tidak langsung PAD dan DAU terhadap Kemandirian Daerah adalah sebesar 96,35%. Hasil ini sama dengan koefisien determinasi sebesar 0,963 atau 96,3%, dan nilai F hitung > F tabel (1537.135 > 3,07). Pengujian secara bersama-sama menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,963. Dengan begitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Langsung dan Tidak Langsung secara simultan terhadap Kemandirian Daerah. Hasil ini sejalan dengan Nurafni (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh langsung dan tidak langsung secara parsial terhadap Kemandirian Daerah. Hasil Perbandingan Pendapatan Asli Daerah/PAD (X_1) terhadap Kemandirian Daerah diperoleh t hitung sebesar 36.666 dan t tabel sebesar 1.980 atau t hitung $>$ t tabel ($36.666 > 1.980$) maka dapat dibuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Selanjutnya Hasil Perbandingan Dana Alokasi Umum/DAU (X_2) terhadap Kemandirian Daerah diperoleh t hitung sebesar -7,861 dan t tabel sebesar 1,980 atau t hitung $<$ t tabel ($-7,861 < 1,980$) maka dapat dibuktikan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap Kemandirian Daerah. Dengan begitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Afrizal (2011) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara langsung dan tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh langsung dan tidak langsung secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 6,418 $>$ F tabel 3,07. Pengujian secara bersama-sama menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,099. Pengaruh Langsung secara bersama-sama PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu sebesar 31,01% dan Pengaruh Tidak Langsung secara bersama-sama PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu sebesar -21,10%. Maka pengaruh total yang didapatkan dari Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu sebesar 9,90%. Dengan demikian PAD dan DAU berpengaruh signifikan baik Langsung dan Tidak Langsung secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mawarni (2013) yang menyatakan bahwa PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Aceh.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.

Hasil pengolahan data menunjukkan pengaruh PAD (X_1) secara langsung hanya sebesar 6,50% dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, karena t hitung sebesar 1,590 $<$ t tabel sebesar 1,980. Pengaruh tidak langsungnya -10,55%, sehingga pengaruh langsung dan tidak langsung PAD (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi -4,05%. Selanjutnya hasil Pengolahan data pengaruh DAU (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi diperoleh t hitung sebesar -3,090 dan t tabel sebesar 1,980 atau t hitung $>$ t tabel, maka dapat dibuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya DAU berpengaruh signifikan secara langsung dan tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Afrizal (2011) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh daerah digunakan untuk kegiatan yang bertujuan pemerataan Pertumbuhan Ekonomi antar daerah, sehingga peran PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Seharusnya PAD dan DAU yang diterima daerah dialokasikan untuk pembelanjaan pembangunan sebagai sarana dan prasarana guna meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi tetapi PAD dan DAU tersebut dialokasikan untuk belanja rutin sehingga pengalokasiannya tidak tepat sasaran.

Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.

Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, karena F hitung $<$ F tabel (0,328 $<$ 3,07) dengan nilai Sig. 0,568 $>$ 0,05. Pengujian secara bersama-sama menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,003. Pengaruh Langsung Kemandirian Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi sangat kecil yaitu sebesar 0,3%. Dengan begitu Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Apriana (2010) yang menyatakan bahwa Kemandirian Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.

Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Daerah sebesar -1,6%, melalui DAU sebesar -6,41%, sehingga secara total pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -8,01%. Selanjutnya pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Daerah sangat kecil yaitu sebesar -0,67%. Pengaruh melalui X_2 melalui kemandirian daerah dan PAD adalah sebesar 2,6%,

sehingga secara total pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi melalui X_2 dan Y hanya sebesar 1,93%. Dengan demikian pengaruh total PAD dan DAU secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah, pengaruhnya negatif sebesar -6,08%. Dari hasil diatas menunjukkan tidak ada pengaruh langsung secara signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Daerah dan tidak ada pengaruh langsung kemandirian daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Afrizal Tahar (2011) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh langsung dan tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum(DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Daerah.

SIMPULAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dengan koefisien determinasi sebesar 0,963. Artinya 96,3% perubahan kemandirian daerah dapat dijelaskan oleh PAD dan DAU pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2010-2019.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial mempunyai berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dimana Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan dan signifikan berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien determinasi sebesar 0,099. Artinya perubahan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi hanya mampu dijelaskan oleh PAD dan DAU sebesar 9,9%.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2019.
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal Tahar dan Maulida Zakhya. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Apriana, Dina. dan Suryanto, Rudi., 2010, Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali), *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 11(1).
- Asfia Murni, 2016. *Buku Ekonomika Makro Edisi Revisi*. Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah). *Skripsi*. Semarang.
- Badan Keuangan Daerah, *Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2010-2019*. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
- Badan Keuangan Daerah, Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2010-2019. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Rekap Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2010-2019*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Laju Pertumbuhan EKonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, 2010-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Departemen Dalam Negeri, 1991, *Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab*, Litbang Depdagri, Jakarta.
- Dina Apriyana dan Rudy Suryanto, *Jurnal Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi(Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Evi Mayangsari Susilo, 2010. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Marketing mix terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan konsumen kartu perdana AS di Kec. Kaliwates, *Skripsi*. UNEJ
- Ghozali, Imam., 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Kementerian Keuangan RI, 2019, *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2010-2019*.
- Linda Agustin, September 2011. *Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Biaya Perawatan, Fasilitas, Lokasi dan Pelayanan Terhadap Loyalitas melalui Kepuasan Pasien*, Universitas Muhammadiyah Jember
- Mudradjat Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

- Nurafni Kustianingsih, Muslimin dan Abdul Kahar, 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, *Tesis*, Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana, Universitas Tadulako
- Tambunan, Tulus TH, 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyanto, 2000. Kemandirian dan Otonomi Daerah, *Media Ekonomi dan Bisnis*, 12(1)
- Susilo, Gideon Tri Budi. dan Hariadi, Priyo., 2007, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Provinsi Jawa Tengah), *Konferensi Penelitian Akuntansi dan Sektor Publik*
- Republik Indonesia, 2015, *UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia, 2005, *UU Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*
- Republik Indonesia, *UU Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011*
- Republik Indonesia, 1999, *UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Republik Indonesia. 2004, *UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia, 2000, *UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*